

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Provinsi NTB merupakan daerah yang memiliki potensi menjanjikan bagi investasi dalam berbagai sektor baik pariwisata, perikanan, peternakan, pertambangan maupun hasil bumi. Secara umum, Provinsi NTB terdiri dari dua pulau besar yakni Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa serta 278 pulau kecil lainnya. Wilayah Provinsi NTB dapat diakses dengan menggunakan jalur udara maupun laut dengan tersedianya 3 bandar udara utama dan 4 pelabuhan laut baik di Pulau Lombok maupun di Pulau Sumbawa.

Gambar 1.1 *Peta Geografi dan Demografi NTB*



- Terdiri atas 2 pulau besar (Lombok & Sumbawa) dan 278 Pulau Kecil
- Jumlah Penduduk 4,7 Juta Jiwa (Lombok : 3,3 Juta Jiwa, Sumbawa : 1,4 Juta Jiwa)
- Terdiri atas 3 Etnis utama (Suku Sasak di Lombok, Suku Samawa & Suku Mbojo di Sumbawa)
- Luas Wilayah 49.312 Km² (Daratan : 20.153 Km², Laut: 29.159 Km², Garis Pantai : 2.333 Km)
- Administrasi wilayah 8 wilayah kabupaten & 2 wilayah Kota.
- Iklim Tropis (Curah Hujan : 1.547 - 3.989 mm/Thn; Temp:17° C - 34° C)

Sumber : BKPM PTSP Provinsi NTB. <http://bkpm-ptsp.ntbprov.go.id/index.php/informasi-umum/wilayah>

Berdasarkan data hasil survei sosial ekonomi nasional yang dilakukan pada tahun 2012, penduduk di NTB mencapai total hingga 4.587.562 jiwa dengan 2.228.493 jiwa diantaranya merupakan laki – laki dan 2.359.069 jiwa lainnya merupakan perempuan.¹ Jika ditinjau dari segi investasi, Provinsi NTB merupakan provinsi yang memiliki berbagai macam komoditi potensial bagi unit usaha, seperti jagung dengan produksi mencapai 642.674 ton pertahun, rumput laut dengan produksi hingga 756.355 ton pertahun, sapi dengan populasi 1,1 juta ekor, mutiara dengan produksi hingga 0,38 ton pertahun hingga tembakau dengan nilai produksi mencapai 35.000 ton pertahunnya yang memenuhi 85% kebutuhan tembakau virginia Indonesia.²

Berbagai potensi dan keunggulan daerah tersebut merupakan kunci penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di NTB dalam era otonomi daerah saat ini melalui upaya memacu peningkatan investasi.³ Penanaman modal di daerah terutama secara langsung dalam sektor riil memiliki peran yang dominan dalam pembangunan perekonomian daerah. Selain menunjang pendapatan daerah, investasi di sisi lain juga dapat meningkatkan daya beli masyarakat secara menyeluruh. Era otonomi daerah saat ini merupakan momentum yang sangat sesuai untuk memaksimalkan investasi guna memacu pertumbuhan ekonomi. Otonomi daerah memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk merealisasikan rencana pembangunan wilayah dengan mengelola dan mengontrol kehadiran

¹BKPM PTSP Provinsi NTB. Informasi Umum. <http://bkpm-ptsp.ntbprov.go.id/index.php/informasi-umum/wilayah> diakses pada 1 Februari 2017.

² Antara NTB. Perusahaan Asing Beroperasi di NTB. <http://antaranb.com/print/17090/331-perusahaan-asing-beroperasi-di-ntb> diakses pada 1 Februari 2017.

³ Business Environment. Penanaman Modal dalam era otonomi daeah. <https://businessenvironment.wordpress.com/2007/01/05/penanaman-modal-dalam-era-otonomi-daerah/> diakses pada 1 Februari 2017.

industri andalan, kegiatan produksi serta perdagangan dalam kerangka investasi.

Selama beberapa tahun terakhir, Provinsi NTB telah berupaya untuk meningkatkan iklim investasi di NTB secara signifikan baik dari segi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Pada tahun 2011 misalnya, investor yang telah menanamkan modalnya dan beroperasi di NTB mencapai hingga 331 unit dan tersebar di 10 kabupaten/kota di NTB.⁴ Sejak tahun 2012, investasi di NTB dianalisis mengalami peningkatan yang signifikan dibuktikan dengan tercapainya target investasi yang dicanangkan oleh BKPM RI dan RPJMD setiap tahunnya.⁵

Sehubungan dengan itu, iklim investasi di NTB selama beberapa tahun terakhir dapat terlihat pada data BKPMPTSP NTB berikut ini. Pada tahun 2012, realisasi investasi di NTB mencapai nilai sebesar Rp.1.777.633.467.869 yang terdiri dari 79 perusahaan, dimana 18 perusahaan diantaranya merupakan PMDN dan 61 perusahaan lainnya merupakan PMA dengan nilai investasi sebesar US\$ 115.447.250 atau setara dengan Rp.1.039.025.250.000,-.⁶ Sedangkan pada tahun 2013, realisasi investasi mengalami peningkatan yang signifikan dengan mencapai total Rp.4.912.022.141.428 yang terdiri dari 317 perusahaan dengan 55 perusahaan dari segi PMDN dan 262 perusahaan dari segi PMA. Total nilai PMA pada tahun ini yakni US\$

⁴ Traveling Bisnis. Investasi Asing. <http://traveling.bisnis.com/read/20120707/224/84932/investasi-asing-investor-polandia-and-kroasi-minati-ntb> diakses pada 1 Februari 2017.

⁵Repository UMY. <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/2679/5.%20BAB%20III.pdf?sequence=7&isAllowed=y> diakses pada 1 Februari 2017.

⁶ BKPM PTSP NTB. Realisasi Investasi 2012. <http://bkpm-ptsp.ntbprov.go.id/index.php/capaian-kinerja/realisasi-investasi#tahun-2012> diakses pada 1 Februari 2017.

337.484.443 atau setara dengan Rp.3.374.844.430.000.⁷ Pada tahun 2014, realisasi investasi di NTB sedikit mengalami peningkatan dengan total investasi sebesar Rp.6.228.968.067.701 dengan nilai investasi PMDN sebesar Rp.1.350.586.547.701 dan nilai PMA sebesar US\$ 487.838.152 atau setara dengan Rp.4.878.381.520.000,-⁸.

Pada tahun 2015, Pemerintah Provinsi NTB kemudian mengeluarkan sejumlah peraturan baru yang dianalisis sebagai bentuk reformasi atas regulasi – regulasi sebelumnya terkait investasi di NTB. Peraturan tersebut seperti dibentuknya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal dan dikeluarkannya SK Gubernur tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Gubernur kepada Kepala BKPM PTSP NTB. Pembentukan dua regulasi ini kemudian diikuti dengan diterbitkannya aturan baru pada tahun 2016 terkait dengan perbaikan infrastruktur dan kemudahan pajak serta retribusi daerah melalui adanya Perda nomor 9 tahun 2016 tentang percepatan pembangunan infrastruktur jalan strategis pola pembiayaan tahun jamak serta Perda nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemberian Insentif Keringanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. Penerbitan keseluruhan aturan ini merupakan bentuk dari upaya pemerintah daerah guna meningkatkan investasi asing di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

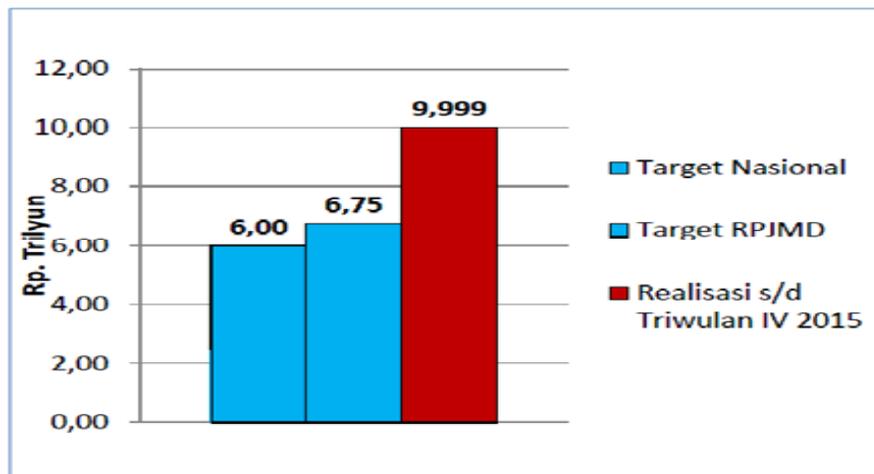
Hasilnya, pertumbuhan realisasi investasi yang sangat pesat kemudian terjadi pada tahun 2015 dimana realisasi investasi di NTB meningkat drastis dan mencapai total hingga Rp. 9.999.294.000.000

⁷ BKPM PTSP NTB. Realisasi investasi 2013. <http://bkpm-ptsp.ntbprov.go.id/index.php/capaian-kinerja/realisasi-investasi#tahun-2013> diakses pada 1 Februari 2017.

⁸ BKPM PTSP NTB. Realisasi investasi 2014. <http://bkpm-ptsp.ntbprov.go.id/index.php/capaian-kinerja/realisasi-investasi#tahun-2014> diakses pada 1 Februari 2017.

pada akhir triwulan IV. Pada tahun 2015, investasi PMDN mencapai Rp.347.850.000.000 dengan adanya penambahan 6 perusahaan dan nilai investasi PMA mencapai hingga US\$ 699.380.000 atau setara dengan Rp.9.651.444.000.000,- melalui keberadaan 139 perusahaan.⁹ Nilai investasi tersebut terbagi menjadi tiga sektor yakni primer, sekunder dan tersier.

Tabel 1.1. Target investasi nasional dan RPJMD serta realisasi investasi di NTB tahun 2015



Sumber : BKPM PTSP Provinsi NTB. <http://bkpm-ptsp.ntbprov.go.id/index.php/capaian-kinerja/realisasi-investasi#tahun-2015>

Tingginya peningkatan realisasi investasi pada tahun 2015 ini sangat kontras jika dibandingkan dengan investasi di NTB pada tahun – tahun sebelumnya sejak tahun 2012. Pada tahun 2015 ini, realisasi investasi di NTB bahkan telah jauh melampaui target nasional pertahun yang ditargetkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

⁹ BKPM PTSP NTB. Realisasi investasi 2015. <http://bkpm-ptsp.ntbprov.go.id/index.php/capaian-kinerja/realisasi-investasi#tahun-2015> diakses pada 1 Februari 2017.

RI yang hanya mencapai angka hingga 6 triliun rupiah. Realisasi investasi pada tahun 2015 ini bahkan melampaui target investasi yang harus dipenuhi dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) tahun 2015 yang mencangkan bahwa investasi di NTB pada tahun 2015 setidaknya dapat mencapai total Rp.6,752 triliun.¹⁰ Laju investasi pada tahun 2015 ini juga mencapai hingga 60,53% dan berhasil melampaui target laju pertumbuhan investasi RPJMD tahun 2015 yang hanya sebesar 8,4%. Perbandingan perkembangan realisasi investasi di NTB selama 5 tahun terakhir selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Tabel 1.2. Perkembangan realisasi investasi di NTB selama 5 tahun (2011 s/d 2015)

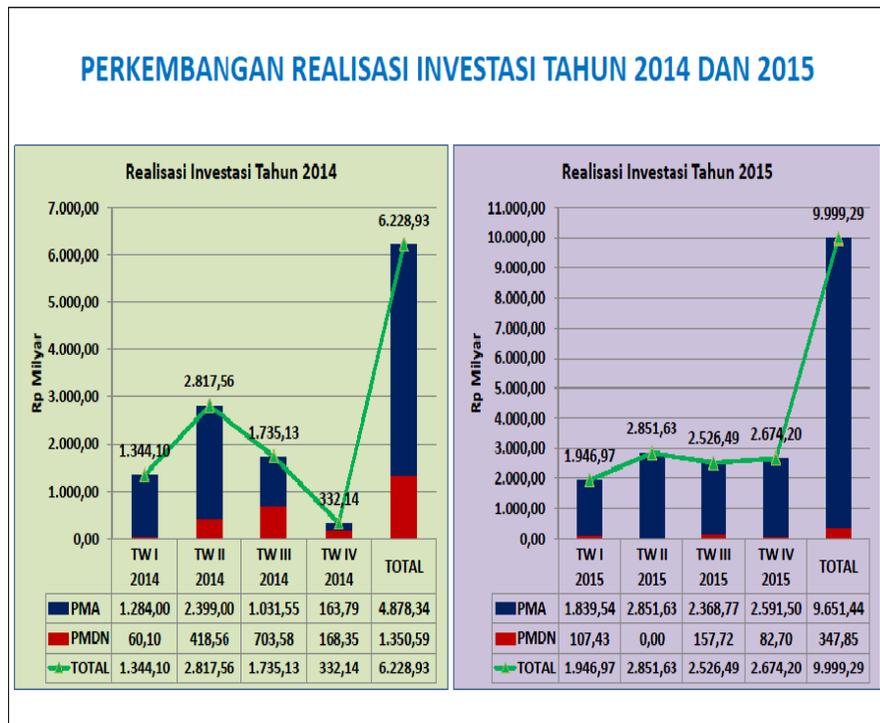


Sumber : BKPM PTSP Provinsi NTB. <http://bkpm-ptsp.ntbprov.go.id/index.php/capaian-kinerja/realisasi-investasi#tahun-2015>

¹⁰BKPM PTSP NTB. Rekap Perizinan. <http://bkpm-ptsp.ntbprov.go.id/index.php/capaian-kinerja/rekap-perizinan#tahun-2015> diakses pada 1 Februari 2017.

Pada tabel dibawah ini juga disajikan perbandingan mendetail terkait dengan perkembangan realisasi investasi di NTB khususnya pada tahun 2014 dan 2015 dimana dapat dilihat pada tahun tersebut memang mengalami peningkatan yang signifikan, namun peningkatan yang sangat tinggi terlihat terjadi secara drastis pada tahun 2015. Peningkatan investasi bahkan mencapai hingga lebih dari 3 triliun rupiah yang terjadi pada tahun 2015.

Tabel 1.3. Tabel Perbandingan realisasi investasi tahun 2014 dengan tahun 2015

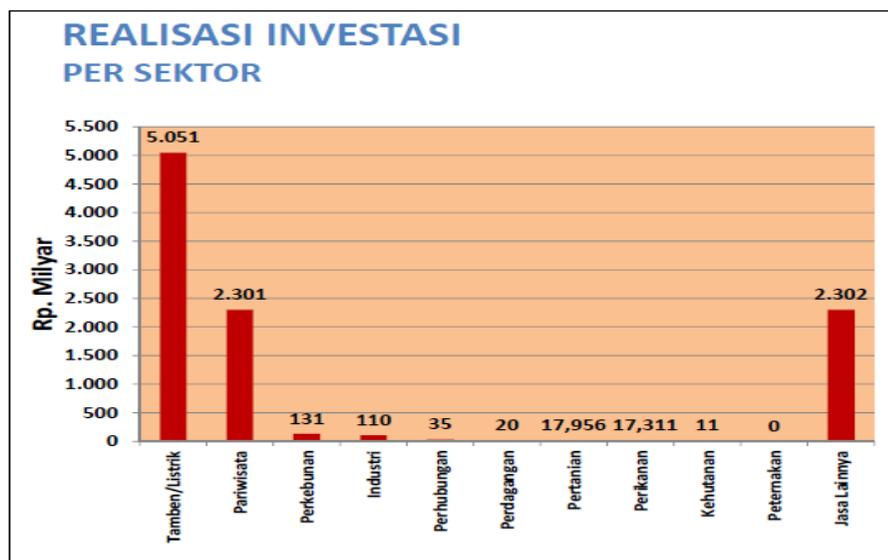


Sumber : BKPM PTSP Provinsi NTB. <http://bkpm-ptsp.ntbprov.go.id/index.php/capaian-kinerja/rekap-perizinan#tahun-2015>

Terlepas dari perbandingan realisasi investasi tersebut, perlu diketahui bahwa sektor pariwisata dan pertambangan mendominasi realisasi investasi di NTB secara keseluruhan pada beberapa tahun

terakhir. Namun berdasarkan data investasi pada tahun 2015 yang dihitung hingga akhir triwulan IV yakni Januari hingga Desember 2015, sektor pertambangan serta energi menjadi sektor dengan realisasi investasi tertinggi yang mencapai hingga Rp.5,051 triliun. Pesatnya laju investasi pada tahun ini kemudian meningkatkan penyerapan tenaga kerja di NTB pada tahun yang sama yakni mencapai hingga 10.676 jiwa, dimana 10.466 diantaranya merupakan TKI dan 210 jiwa lainnya merupakan tenaga kerja asing.

Tabel 1.4. Realisasi investasi per sektor pada tahun 2015



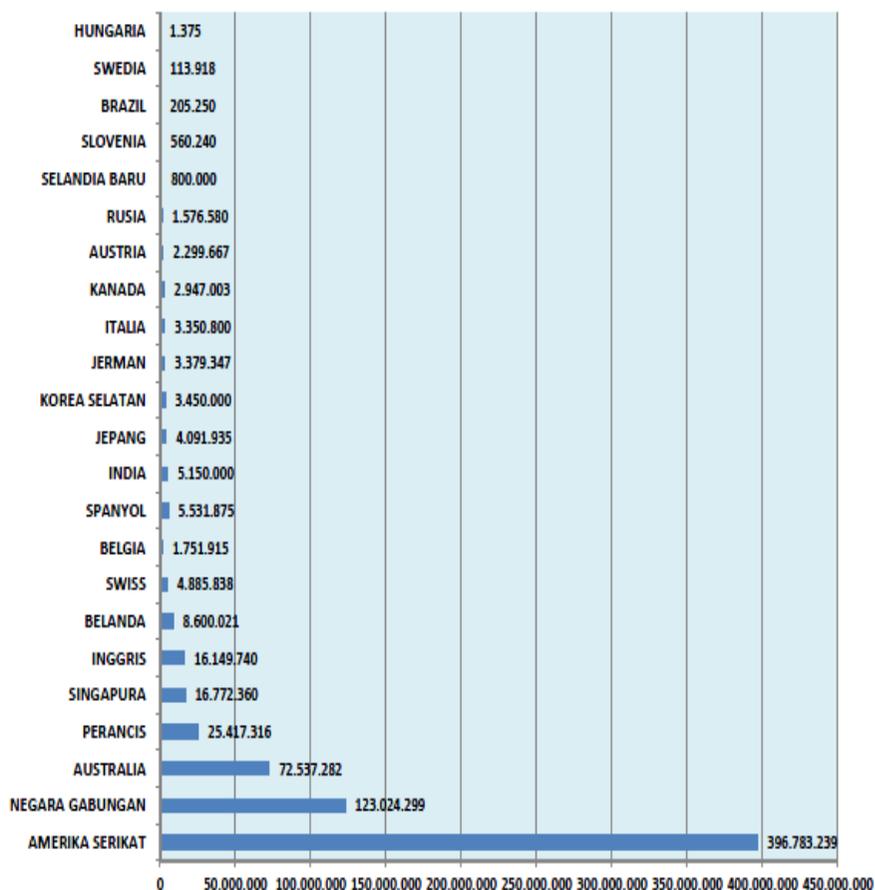
Sumber : *BKPM PTSP NTB*. <http://bkpm-ptsp.ntbprov.go.id/index.php/capaian-kinerja/realisasi-investasi#tahun-2015>.

Berdasarkan data BKPMPTSP NTB, pada tahun 2015, investasi asing di NTB berasal dari 23 negara dimana Amerika Serikat menjadi negara investor terbesar di NTB dengan total nilai investasi sebesar US\$ 396.7 juta. Posisi kedua disusul oleh saham dari negara gabungan

kemudian investasi dari Australia, Perancis, Singapura serta Inggris. Grafik di bawah ini kemudian menunjukkan negara – negara yang berinvestasi di NTB beserta kuantitas jumlah investasi masing – masing negara yang dihitung menggunakan kurs dolar Amerika Serikat (US\$).

Tabel 1.5 Negara Asal Investasi PMA Tahun 2015

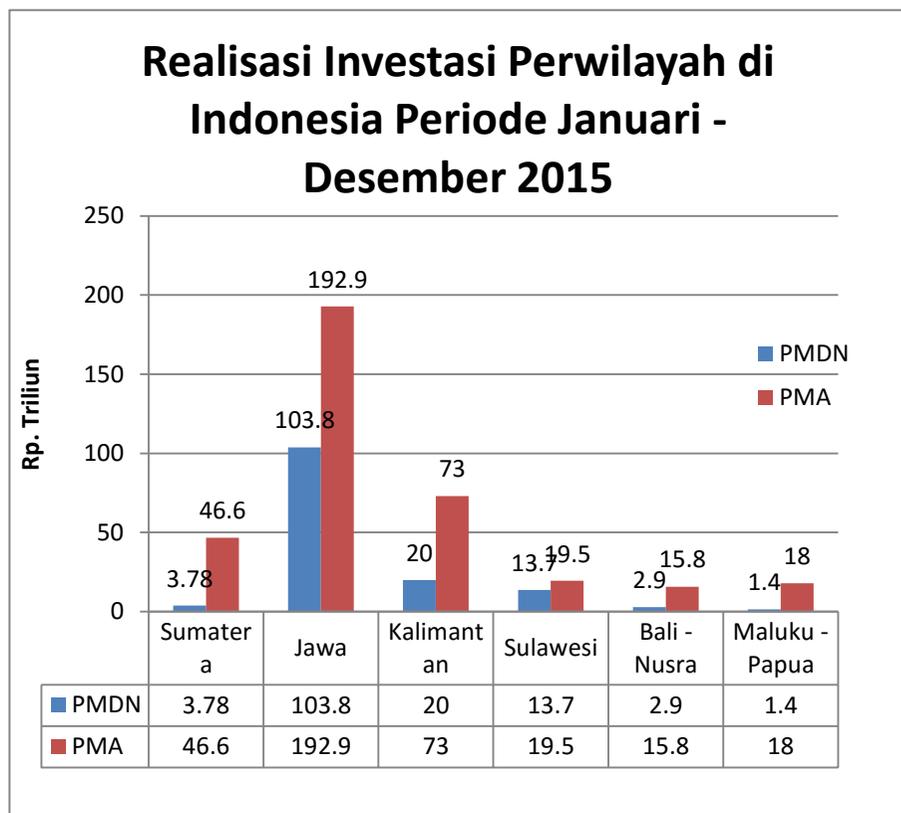
REALISASI INVESTASI JANUARI – DESEMBER TAHUN 2015 BERDASARKAN NEGARA ASAL (US\$.)



Sumber : NTB Dalam Angka 2016 mengutip data BKPM PT NTB, dari <http://ntb.bps.go.id/ntb-dalam-angka-2016/>

Pada tahun 2015, Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM RI) juga mengeluarkan data – data realisasi investasi setiap wilayah di seluruh Indonesia melalui siaran persnya per tanggal 21 Januari 2016. Siaran pers tersebut mengumumkan realisasi investasi di seluruh wilayah Indonesia pada periode Januari hingga Desember 2015. Data – data tersebut dapat ditinjau lebih lanjut pada diagram di bawah ini.

Tabel 1.6 Realisasi Investasi Per-wilayah di Indonesia Periode Januari - Desember 2015



Sumber:

BKPM

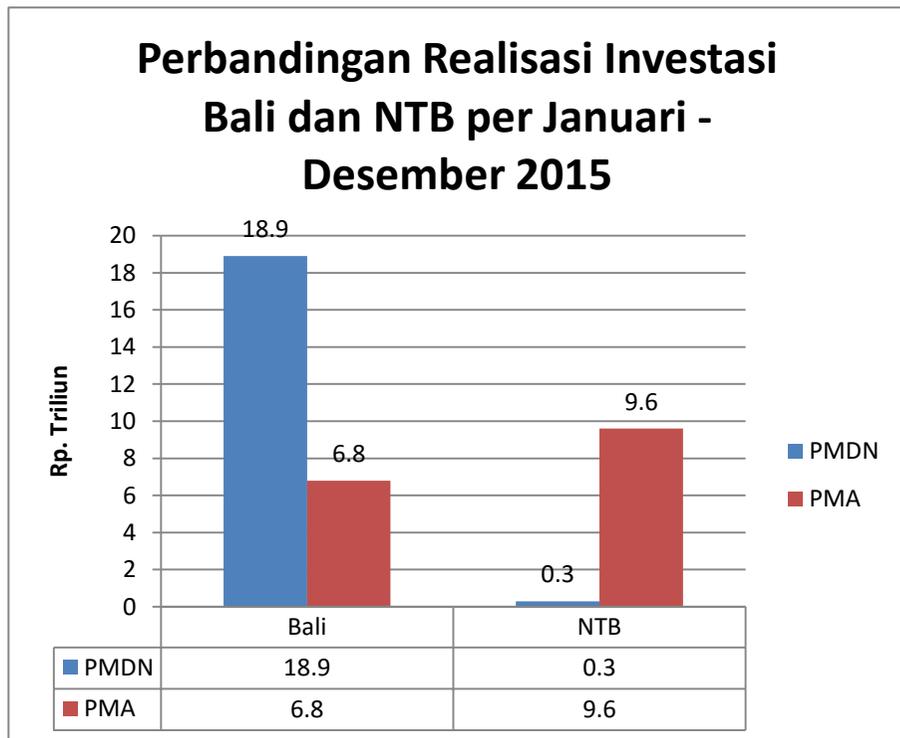
RI.

www2.bkpm.go.id/images/uploads/file_siaran_pers/press_release_IND_TW_IV_2015.pdf

Data diatas menunjukkan pesatnya peningkatan realisasi investasi khususnya Provinsi Bali dan Nusa Tenggara. Menurut data sebelumnya, pada tahun 2014, realisasi investasi Bali dan Nusa Tenggara hanya mencapai total sebesar US\$ 270 juta atau setara dengan Rp. 3.6 triliun, namun pada tahun 2015 realisasi investasi yang dicapai berjumlah total hingga Rp. 15.8 triliun. Besarnya peningkatan realisasi investasi ini merupakan prestasi dan capaian besar bagi wilayah Bali serta Nusa Tenggara yang dapat meningkatkan angka investasi di daerahnya dalam waktu satu tahun.

Realisasi investasi di NTB dari segi PMA pada khususnya bahkan melonjak tajam hingga melampaui realisasi investasi Provinsi Bali serta target nasional BKPM RI pada tahun yang sama. Peningkatan tersebut jauh berbeda dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya sehingga menimbulkan suatu pertanyaan besar terkait dengan upaya apa yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi NTB guna mendorong dan meningkatkan investasi asing di NTB pada tahun 2015 khususnya periode Januari hingga Desember. Berikut di bawah ini dilampirkan data realisasi investasi antara Provinsi Bali dan Provinsi NTB pada tahun 2015 yang dapat digunakan sebagai perbandingan untuk menitikberatkan pada perkembangan pesat Provinsi NTB yang mampu mengungguli Provinsi Bali dari segi PMA pada tahun terkait.

Tabel 1.7 Perbandingan Realisasi Investasi Bali dan NTB per Januari - Desember 2015



Sumber: *Bisnis Finansial dan BKPM PTSP Provinsi NTB*, dari m.bisnis.com/finansial/read/20160214/9/518947/lokasi-makin-menarik-realisis-investasi-di-bali-melonjak-tajam-2015 & <http://bkpm-ptsp.ntbprov.go.id/index.php/capaian-kinerja/realisasi-investasi#tahun-2015>.

Dari diagram diatas dapat ditinjau bahwa realisasi investasi asing Provinsi NTB pada tahun 2015 berhasil melampaui realisasi investasi Provinsi Bali. Pada tahun - tahun sebelumnya seperti yang telah ditampilkan oleh data – data pada halaman sebelumnya terlihat bahwa Provinsi NTB dari segi PMA masih belum dapat mengungguli provinsi lain seperti Bali yang memiliki potensi dan komoditi unggulan yang sama yakni pariwisata. Namun pada tahun 2015, Provinsi NTB berhasil meningkatkan capaian realisasi investasinya secara cukup

drastis dengan menghasilkan perbedaan angka Rp. 2,8 triliun dengan Provinsi Bali.

Prestasi ini tak terlepas dari besarnya upaya pemerintah daerah melalui pembentukan sejumlah aturan – aturan baru yang pro investasi di NTB. Dikeluarkannya sejumlah regulasi baru terkait dengan peningkatan investasi asing di NTB kemudian menjadi fokus utama penulis dalam penelitian thesis ini. Setiap tahunnya realisasi investasi di NTB mengalami peningkatan secara signifikan, namun pada tahun 2015 – 2016 pada khususnya, Pemerintah Provinsi NTB cenderung terlihat sangat aktif untuk melakukan deregulasi terhadap aturan – aturan mengenai investasi di daerah. Bahkan dalam perkembangannya hingga saat ini, pemerintah masih dalam tahapan untuk merancang sejumlah kebijakan baru guna memfasilitasi kemudahan – kemudahan berinvestasi di NTB.

B. Tujuan Riset

Tujuan penulis mengangkat penelitian ini adalah :

1. Menganalisis faktor – faktor yang mempengaruhi terbentuknya kebijakan – kebijakan peningkatan investasi asing di NTB pada tahun 2015 – 2016.
2. Penulisan ini juga ditujukan untuk melengkapi tugas akhir penulis yang merupakan syarat kelulusan untuk memperoleh gelar magister strata dua (S2) pada Program Studi Magister Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

C. Kontribusi Riset

Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat seperti:

1. Menyajikan data ilmiah terkait dengan faktor – faktor yang mempengaruhi pembentukan kebijakan – kebijakan peningkatan investasi di NTB.
2. Memunculkan pemahaman baru terkait dengan strategi kebijakan yang digunakan Pemerintah Provinsi NTB dalam meningkatkan investasi asing di NTB terutama pada tahun 2015 – 2016.
3. Memberikan referensi terkait dengan strategi kebijakan yang dapat digunakan pemerintah daerah untuk meningkatkan investasi baik investasi asing maupun penanaman modal dalam negeri sehingga kedepannya pemerintah daerah dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai basis pembelajaran dan panduan untuk memaksimalkan potensi daerah melalui upaya meningkatkan investasi yang dikelola langsung oleh daerah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah yakni, “Faktor – faktor apa yang mendorong terbentuknya kebijakan – kebijakan peningkatan investasi di NTB pada tahun 2015 – 2016?”.

E. Studi Pustaka

Sebagai *literature review*, penulis menggunakan sejumlah jurnal maupun karya ilmiah sebagai pelengkap data salah satunya adalah dengan menggunakan jurnal karya Maria Tinamberan yang berjudul Peran Pemerintah Kota Bitung dalam Peningkatan Investasi Asing di Sektor Pariwisata.¹¹ Dalam jurnal tersebut ditegaskan bahwa Pemerintah Kota Bitung berupaya untuk menciptakan iklim penanaman modal yang lebih baik dengan melakukan berbagai upaya yang tertuang dalam berbagai kebijakan pemerintah baik dalam bentuk kebijakan pemerintah pusat tentang investasi asing di Indonesia hingga membentuk peraturan daerah tentang tata cara pelaksanaan investasi asing di daerah seperti pembentukan pelayanan terpadu satu pintu yang diberlakukan sejak tahun 2009 hingga saat ini. Melalui kebijakan ini, urusan perizinan dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan tidak berbelit – belit sehingga membawa kemajuan dalam peningkatan investasi asing di Kota Bitung. Selain itu, dibentuk aturan mengenai tidak adanya pemungutan biaya apapun terkait izin registrasi.

Selanjutnya, dilakukan penghapusan seluruh retribusi terhadap perusahaan yang bergerak di bidang industri perikanan. Kemudian, total nilai investasi asing lebih dari Rp.10.000.000.000 akan langsung dilaporkan secara online kepada BKPM. Kemudian dibentuk juga regulasi dimana perusahaan yang melakukan PMA wajib melaporkan kegiatannya melalui LKPM setiap 3 bulan sekali apabila perusahaan tersebut masih dalam tahap pembangunan, dan setiap 6 bulan sekali

¹¹ E Journal Unsrat. Peran Pemerintah Kota Bitung dalam Peningkatan Investasi Asing di Sektor Pariwisata. <http://www.ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/download/10310/9896> diakses pada 1 Februari 2017.

apabila sudah berada dalam tahap produksi yang ditujukan kepada Pemerintah Kota Bitung. Kemudian, perusahaan PMA yang telah mendapatkan izin prinsip dari BKPM RI lalu harus melanjutkan proses ke arah izin usaha.

Dalam jurnal ini juga di paparkan secara khusus mengenai peran Pemerintah Kota Bitung dalam meningkatkan investasi asing. Terdapat sejumlah point utama yang menjelaskan hal ini yakni pertama upaya Pemerintah Kota Bitung dalam membangun infrastruktur yang lebih baik dalam bentuk teknis maupun fisik seperti jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi, pelabuhan maupun pengelolaan limbah. Yang kedua, Pemerintah Kota Bitung berupaya menciptakan tenaga kerja siap pakai melalui ketersediaan putra putri daerah yang berpendidikan, ahli, berketerampilan dan menguasai teknologi.

Yang ketiga, Pemerintah Kota Bitung memberikan kemudahan untuk izin daerah dengan menjamin investor dalam hal kemudahan perizinan seperti izin mendirikan bangunan, izin gangguan, izin tempat penjualan minuman beralkohol (ITPMB), surat izin tempat usaha hingga surat izin usaha pariwisata. Selain itu, Pemerintah Kota Bitung juga memberikan kemudahan berusaha melalui insentif skema pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Pemerintah Kota Bitung juga memberikan jaminan hukum agar dapat menciptakan rasa aman dan kenyamanan bagi investor untuk berinvestasi di daerah. Selain itu, Pemerintah Kota Bitung juga melaksanakan program bimbingan teknis serta membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi investor yang sudah berinvestasi. Point – point tersebut kemudian berperan besar dalam meningkatkan investasi asing di Kota Bitung secara signifikan.

Selain jurnal tersebut, penulis juga menggunakan jurnal lain sebagai studi pustaka seperti jurnal karya kompilasi dari Andi Sopandi dan Nandang Nazmulmunir dalam jurnal *Kybernan* Volume 3 yang berjudul Pengembangan Iklim Investasi Daerah.¹² Pada jurnal ini diterangkan bahwa perkembangan dinamika ekonomi regional tak terlepas dari pengaruh konsumsi domestik yang dipengaruhi besar oleh adanya investasi dan ekspor. Oleh karena itu, perlu dilakukan sejumlah upaya untuk mengkondusifkan iklim investasi terutama investasi di daerah.

Pada jurnal ini, disajikan sejumlah gagasan utama yang dikategorikan menjadi beberapa point seperti penjelasan dan gambaran umum mengenai investasi di Indonesia berserta penjelasan rinci terkait perkembangan tenaga kerja dan lapangan kerja di Indonesia. Kemudian dijelaskan tentang faktor – faktor yang mempengaruhi iklim investasi di Indonesia yakni inflasi, etika dan kinerja tenaga kerja yang buruk, pemerintahan yang tidak stabil, kriminalitas, regulasi valas, akses terhadap keuangan, tarif pajak, regulasi tenaga kerja restriktif, kebijakan tidak stabil, kualitas SDM yang buruk, korupsi, regulasi perpajakan, hingga birokrasi yang tidak efisien.

Pada bagian selanjutnya kemudian dijelaskan mengenai peningkatan iklim investasi di daerah disertai dengan gambaran mengenai potensi daerah serta hambatan bagi perkembangan investasi di daerah. Ulasan mengenai tenaga kerja juga melengkapi gagasan utama dalam bagian ini. Bagian akhir jurnal ini akan ditutup dengan adanya sejumlah penjelasan mengenai peranan pemerintah daerah dalam meningkatkan investasi di daerah beserta sejumlah fungsi serta

¹² Portal Garuda. Jurnal pengembangan iklim investasi daerah. <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=95009&val=1230#page=1&zoo m=auto,-198,735> diakses pada 1 Februari 2017.

strategi pengembangan ekonomi seperti pengembangan fisik/lokalisasi kawasan industri maupun kawasan investasi serta dilakukannya strategi pengembangan dunia usaha melalui kebijakan – kebijakan yang merangsang usaha seperti perbaikan kualitas lingkungan, pengembangan pusat informasi dan promosi, pusat pengembangan usaha kecil dan pusat penelitian produk daerah.

Sebagai referensi selanjutnya, penulis kemudian menggunakan jurnal karya George Iwan Marantika dari Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Immanuel yang berjudul Strategi Promosi Investasi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.¹³ Bagian awal jurnal ini dimulai dengan sejumlah ulasan mengenai visi dan misi pemerintah Yogyakarta. Bagian selanjutnya akan berfokus pada strategi pemasaran tempat serta daerah dan penyajian terkait dengan dinamika pertumbuhan daerah yang terjadi di Yogyakarta pada khususnya. Bagian ini akan ditindaklanjuti dengan ulasan yang memberikan penjelasan terkait dengan solusi atas permasalahan – permasalahan daerah seperti dengan melakukan upaya konservasi sumber daya finansial melalui perencanaan program pertumbuhan yang agresif untuk menarik industri, investasi dan wisatawan.

Pada bagian selanjutnya kemudian akan dipaparkan mengenai faktor atraksi daerah yang terdiri dari dua faktor utama yakni *hard factors* dan *soft factors*. *Hard factors* terdiri dari stabilitas ekonomi, produktifitas, biaya, konsep properti, jaringan pendukung lokal, infrastruktur komunikasi, lokasi strategis dan program insentif. Sedangkan *soft factors* terdiri dari pengembangan daerah, kualitas kehidupan lokal, kompetensi profesional dan tenaga kerja, kultur,

¹³ E-Jurnal Ukrim University. Strategi Promosi Investasi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta <http://www.e-jurnal.ukrimuniversity.ac.id/file/35.pdf> diakses pada 1 Februari 2017.

hubungan personal, gaya manajemen, fleksibilitas dan dinamika serta profesionalitas pemasaran. Strategi pemasaran daerah yang ditawarkan jurnal ini terdiri dari beberapa strategi utama yakni *image marketing*, *attraction marketing*, *infrastructure marketing* dan *people marketing*. Pada akhirnya jurnal ini diakhiri dengan menyimpulkan bahwa monitoring dan pemahaman terhadap faktor lingkungan di DIY akan menjadi dasar penyusunan strategi pemasaran investasi yang penting di DIY.

Terlepas dari jurnal ini, penulis kemudian menggunakan karya tulis lain sebagai studi literature yakni jurnal karya Wahyono dalam jurnal dinamika manajemen yang berjudul strategi pemasaran daerah sebagai upaya meningkatkan peluang investasi di kota semarang.¹⁴ Secara umum, jurnal ini berisi analisis terkait dengan strategi marketing regional yang merupakan suatu bentuk upaya pemerintah guna meningkatkan investasi di Semarang. Jurnal ini menunjukkan alasan teratriknya investor dalam menanamkan investasi yang dilatarbelakangi oleh sejumlah alasan seperti adanya variabel yang menunjukkan bahwa investor tertarik karena melihat dinamika kehidupan masyarakat Semarang serta adanya aspek potensi dan peluang dari masyarakat untuk dapat dimanfaatkan sebagai pengembangan peluang investasi.

Data – data dalam jurnal ini diperoleh melalui sejumlah upaya korespondensi dengan beberapa narasumber seperti birokrat, investor, pengusaha maupun masyarakat yang digolongkan penulis ke dalam istilah “*stakeholders*”. Dari keseluruhan responden tersebut, penulis mencoba untuk menelusuri tingkat kepuasan masyarakat yang menyebabkan tingginya nilai atraksi terhadap Kota Semarang.

¹⁴ E Jurnal. Strategi pemasaran daerah sebagai upaya meningkatkan peluang investasi di kota semarang. <http://www.e-jurnal.com/2014/11/strategi-pemasaran-daerah-sebagai-upaya.html> diakses pada 1 Februari 2017.

Penilaian tersebut ditinjau melalui tiga point utama yakni dinamika masyarakat, iklim bisnis dan kebijakan pemerintah setempat. Dari ketiga point tersebut, responden memberikan penilaian terbesar kepada faktor iklim bisnis di Kota Semarang sebagai faktor atraksi utama. Sebaliknya faktor kebijakan pemerintah meraih point terendah. Namun terlepas dari fakta tersebut, tingginya point bagi iklim bisnis menunjukkan bahwa investasi di Kota Semarang merupakan sesuatu hal yang menjanjikan terutama bagi investor. Untuk mengimbangi baiknya iklim bisnis di kota tersebut, pemerintah harus meningkatkan kualitas pelayanan maupun kebijakan – kebijakannya sehingga mampu memfasilitasi iklim investasi di Kota Semarang.

F. Kerangka Teoritik

1. Konsep Investasi Asing

Secara definitif menurut sejumlah pakar – pakar ekonomi, konsep investasi memiliki sejumlah varian pengertian dengan persamaan tujuan yakni adanya akumulasi suatu bentuk aktiva dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Di Indonesia, konsep investasi asing juga kerap dikenal dengan istilah penanaman modal asing atau PMA. Berdasarkan pengertian Fitzgerald, konsep investasi asing dimengerti sebagai suatu akfititas yang berhubungan dengan usaha penarikan sumber – sumber dana yang akan digunakan untuk mengadakan barang modal pada saat ini dimana nantinya barang modal tersebut akan terus dihasilkan pada masa yang akan datang dengan mengeluarkan barang modal melalui produk yang baru.

Sedangkan menurut James C. Van Home, investasi merupakan suatu kegiatan yang dilangsungkan dengan memanfaatkan pengeluaran kas pada saat ini yang bertujuan untuk menghasilkan laba pada masa yang akan datang.¹⁵

Secara umum, dapat diambil garis besar bahwa investasi merupakan suatu aktifitas menempatkan uang atau dana maupun barang modal dengan harapan nantinya upaya pengeluaran dana tersebut akan menghasilkan perolehan keuntungan tertentu dalam jumlah yang signifikan bagi pihak yang mengeluarkan dana. Secara teoritis, Salim HS dan Budi Sutrisno memandang investasi sebagai suatu kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh investor baik asing maupun domestik dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi dengan tujuan yang tak lain yakni untuk memperoleh keuntungan.¹⁶

Dalam pengertian yang lebih aplikatif, Ensiklopedia Indonesia mendefinisikan investasi sebagai upaya penanaman modal maupun uang dalam proses produksi dengan membeli gedung – gedung, mesin – mesin, bahan cadangan maupun penyelenggaraan uang kas serta perkembangannya. Pengertian ini mengerucutkan pengertian investasi hanya pada ranah aplikatif yakni proses produksi semata.

Pada hakikatnya, kata investasi berasal dari kata *investire* yang berarti memakai atau menggunakan. Sehingga dalam pengertian yang lebih luas, investasi dapat dimengerti sebagai upaya memberikan sesuatu kepada orang lain untuk dikembangkan dimana nantinya hasil

¹⁵ Definisi Pengertian. Investasi Asing. <http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-dan-pengertian-investasi.html?m=1> diakses pada 7 Februari 2017.

¹⁶ Landasan Teori. Penanaman Modal Asing. <http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-penanaman-modal-asing-dan.html?m=1> diakses pada 7 Februari 2017.

dari sesuatu yang dikembangkan tersebut akan dibagi sesuai dengan persetujuan pihak – pihak yang terlibat. Dalam buku M.L. Jhingan yang berjudul ekonomi pembangunan dan perencanaan dijelaskan bahwa penanaman modal memiliki sejumlah variasi dimana investasi dapat dilakukan oleh pihak swasta di negara asal pemilik modal atau bisa juga dengan melakukan penanaman modal suatu negara ke negara lain atas nama pemerintah negara pemilik modal.¹⁷ Dalam buku tersebut, investasi dimengerti sebagai suatu langkah awal untuk memulai kegiatan produksi sekaligus juga sebagai titik awal untuk melakukan pembangunan di suatu daerah.

Investasi dalam hal ini memiliki beberapa varian yang dibedakan berdasarkan asetnya yang dilihat dari aspek modal atau kekayaan, berdasarkan pengaruhnya, berdasarkan sumber pembiayaannya dan berdasarkan bentuknya. Berdasarkan asetnya, investasi terbagi menjadi dua yakni *real asset* dan *financial asset*. *Real asset* merupakan investasi yang berwujud seperti gedung – gedung maupun kendaraan. *Financial asset* merupakan dokumen klaim tidak langsung dari pemegang dokumen terhadap aktifitas riil pihak yang menerbitkan sekuritas tersebut. Sedangkan berdasarkan pengaruhnya, investasi juga terbagi menjadi dua macam yakni investasi autonomus dan investasi *induces*. Investasi autonomus merupakan investasi yang tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan dan bersifat spekulatif. Investasi *induces* merupakan investasi yang dipengaruhi oleh kenaikan permintaan akan barang dan jasa serta tingkat pendapatan.

Berdasarkan bentuknya atau cara menanamkan investasi, investasi terbagi menjadi investasi portofolio (tidak langsung) dan

¹⁷ Salim HS. Budi Sutrisno. 2008. *Hukum Investasi di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.

investasi langsung (*direct investment*). Investasi langsung yakni ketika investor menanamkan uang secara langsung dalam jenis bidang usaha tertentu seperti mendirikan pabrik, bank, toko maupun usaha dan pembelian properti lainnya. Investasi langsung dapat dilakukan dengan mendirikan perusahaan patungan (*joint venture*) dengan mitra lokal, melakukan kerjasama operasi (*joint operation scheme*) tanpa membentuk perusahaan baru, mengkonversikan pinjaman menjadi penyertaan mayoritas dalam perusahaan lokal maupun dengan memberikan bantuan teknis dan manajerial. Sedangkan investasi tidak langsung yakni menanamkan modal secara tidak langsung melalui pembelian saham di pasar modal, obligasi dan sebagainya. Berdasarkan sumber pembiayaannya, investasi terbagi menjadi investasi asing (PMA) dan investasi dalam negeri (PMDN).¹⁸

Investasi asing secara umum dipengaruhi oleh sejumlah faktor yakni tingkat keuntungan investasi yang akan dicapai, prospek ekonomi di masa yang akan datang, kestabilan politik dan perekonomian suatu negara, perubahan dan perkembangan teknologi serta tingkat suku bunga. Menurut Alan M. Rugman, terdapat dua faktor yang mempengaruhi investasi yakni variabel lingkungan dan internalisasi.

Dari segi variabel lingkungan, terdapat tiga faktor yakni ekonomi seperti sumber daya alam, teknologi dan sumber daya manusia. Faktor kedua yakni non ekonomi seperti kondisi politik sosial maupun budaya. Faktor ketiga yakni pemerintah terkait dengan *good governance* pendonor dan penerima. Dalam hal variabel internalisasi terdapat empat faktor utama yakni keunggulan spesifik penanam

¹⁸ Pengertian Pakar. Investasi menurut pakar. <http://www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertian-dan-jenis-investasi-menurut-pakar.html> diakses pada 7 Februari 2017.

modal, struktur dan keterampilan manajemen, tehnik pemasaran serta riset dan pengembangan.

Di Indonesia pada khususnya, terdapat sejumlah syarat dan ketentuan terkait dengan investasi asing, yakni: perusahaan yang dimaksud harus berbentuk Badan Hukum Indonesia yang seluruhnya berada di Indonesia atau sebagian besar berada di Indonesia. Kedua, perusahaan asing wajib menyelenggarakan atau menyediakan fasilitas pelatihan untuk tenaga kerja WNI dengan tujuan suatu saat tenaga kerja asing dapat digantikan sepenuhnya oleh tenaga kerja asal Indonesia.

Kemudian, izin penanaman modal asing memiliki jangka waktu yang terbatas yakni maksimal 30 tahun. Selanjutnya, investor diberikan hak transfer yakni hak untuk mengkonversi nilai suatu barang dengan nilai tukar rupiah pada saat itu untuk akun – akun tertentu seperti laba bersih, biaya tenaga kerja asing maupun penyusutan aktiva tetap. Selain itu, investor juga wajib menjalankan perusahaannya dengan asas – asas ekonomi yang tidak merugikan kepentingan negara. Dan yang terakhir, investor asing wajib memberi kesempatan bagi pemodal dalam negeri untuk masuk setelah jangka waktu tertentu yang telah ditentukan Pemerintah Indonesia.

Aturan mengenai investasi asing di Indonesia pada awalnya diatur dalam UU no.1 Tahun 1967 tentang penanaman modal yang menyatu dengan aturan terkait dengan penanaman modal dalam negeri. Aturan tersebut kemudian diubah menjadi lebih spesifik ke dalam UU No.11 Tahun 1970 yang khusus membahas tentang penanaman modal asing (PMA). Dalam perkembangannya, UU tersebut kemudian mengalami revisi dan dibentuk UU No.25 Tahun 2007 tentang penanaman modal.

Menurut UU tersebut, Pasal 1 Ayat 2 menyatakan bahwa penanaman modal asing merupakan kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh pemodal asing baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.¹⁹ Terkait dengan investasi di daerah di Indonesia, aturan mengenai hal tersebut di atur melalui adanya UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Dalam jurnal Maria Timbernian yang berjudul Peran Pemerintah Kota Bitung dalam Peningkatan Investasi Asing di Sektor Pariwisata disebutkan bahwa UU No.25 Tahun 2007 mencakup point penting dalam mengatasi masalah serius yang kerap kali dihadapi oleh investor yang akan menanamkan modal di Indonesia. Bab I Pasal 1 ayat 10 mencantumkan hal tentang pelayanan terpadu satu pintu yakni kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.

Menurut jurnal tersebut, sistem pelayanan satu atap ini diharapkan dapat mengakomodasi keinginan investor/pengusaha untuk memperoleh pelayanan yang lebih efisien, mudah dan cepat. Investor yang akan membuka usaha di Indonesia kemudian tidak perlu menunggu dalam waktu yang lama untuk memperoleh izin usaha di Indonesia. Selain itu, investor juga dimudahkan karena tidak perlu

¹⁹ Bank Indonesia. UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing. <http://www.bi.go.id/uu-bi/documents> diakses pada 7 Februari 2017

mengeluarkan biaya tambahan karena adanya biaya pajak maupun pungutan lainnya yang dapat membengkak dari tarif resmi akibat panjangnya jalur birokrasi yang harus ditempuh untuk memperoleh izin usaha.

Sehubungan dengan itu, menurut kasus dalam penelitian ini, investasi asing merupakan unsur motor penggerak penting dalam upaya meningkatkan perekonomian dan melakukan pembangunan di daerah khususnya di Provinsi NTB. Potensi – potensi daerah di NTB hanya dapat digerakkan dan diberdayakan secara maksimal melalui adanya dukungan dari investasi terutama investasi asing. Pada beberapa tahun terakhir, Provinsi NTB berhasil meningkatkan infrastruktur maupun perekonomian di daerah seiring dengan semakin meningkatnya realisasi investasi di NTB pada sejumlah sektor penting seperti listrik, tambang, perikanan, pertanian maupun pariwisata.

Adanya investasi asing juga membuat pemerintah daerah semakin berbenah dengan meningkatkan akses terhadap listrik, jalan, air, telekomunikasi maupun transportasi yang dapat memudahkan masyarakat maupun investor untuk memaksimalkan peluang usaha di Provinsi NTB. Dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan baru guna meningkatkan investasi asing di NTB, terbukti pada tahun 2015 realisasi investasi di NTB bahkan meningkat drastis dengan jauh melampaui target nasional dan target investasi yang ditargetkan oleh RPJMD.

Dalam bentuk yang lebih aplikatif juga dapat ditinjau bahwa progress pembangunan infrastruktur di NTB juga berlangsung secara massif dengan semakin banyak dibangunnya sejumlah jalan provinsi maupun nasional yang mampu menghubungkan daerah – daerah di NTB satu sama lainnya. Tak hanya itu, investasi di bidang pariwisata

juga meningkat secara signifikan seiring digalakkannya NTB khususnya Pulau Lombok bagian selatan sebagai kawasan ekonomi khusus yang kemudian berpengaruh pada munculnya investor – investor baru yang menggiatkan pariwisata, pembangunan dan perekonomian di NTB.

Investasi asing pada umumnya membawa keuntungan yang signifikan terutama bagi perkembangan daerah karena sifatnya yang jangka panjang sehingga dapat menunjang pembangunan daerah dalam waktu yang lama. Jangka waktu panjang tersebut juga memungkinkan dilakukannya transfer teknologi dan adanya alih keterampilan manajemen bagi daerah. Terlebih adanya investasi asing juga di sisi lain dapat membuka lapangan pekerjaan baru sehingga sangat efektif dalam mengurangi angka pengangguran di daerah dan meningkatkan pemberdayaan terhadap masyarakat melalui pemerataan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Adanya dampak efek domino yang positif ini kemudian menjadi pertimbangan penting pemerintah daerah dalam melakukan deregulasi terhadap aturan – aturan yang dianggap menghambat peningkatan investasi di NTB.

Pada penelitian ini khususnya, Pemerintah Provinsi NTB membentuk sejumlah kebijakan yang dituangkan melalui beberapa peraturan daerah (Perda) untuk memudahkan investor dalam menanamkan modalnya di NTB. Terdapat tiga perda yang berkontribusi besar dalam meningkatkan realisasi investasi di NTB pada tahun 2015 – 2016 yakni perda tentang penanaman modal yang menegaskan adanya pelayanan terpadu satu pintu, perda tentang percepatan pembangunan infrastruktur jalan strategis provinsi serta perda tentang pemberian insentif keringanan pajak daerah dan retribusi

bagi sektor investasi tertentu yakni pariwisata dalam kerangka kawasan ekonomi khusus Mandalika.

2. Konsep Ekonomi Politik

Ekonomi politik merupakan ilmu tentang ekonomi secara umum baik produksi maupun perdagangan yang berhubungan dengan kebiasaan, pemerintah maupun hukum yang berlaku. Secara singkat, konsep ekonomi politik dapat dimengerti dengan bagaimana teori serta metode dalam ekonomi memberikan pengaruh pada perkembangan sistem sosial yang berlaku. Menurut jurnal ekonomi, kolaborasi antara Michael A Veseth dan David N. Balaam, disebutkan bahwa ekonomi politik merupakan cabang dari ilmu sosial yang mempelajari hubungan antara individu dan masyarakat, antara pasar dengan negara, menggunakan seperangkat alat dan metode yang diambil dari cakupan yang lebih besar yakni ekonomi, ilmu sosial dan sosiologi.²⁰ Atau dengan kata lain, ekonomi politik dimengerti sebagai multidisiplin ilmu yang melibatkan ekonomi, sosial politik, hukum, sejarah, sosiologi maupun disiplin ilmu lainnya dimana hal ini menjelaskan peran penting faktor politik dalam menentukan sebuah capaian ekonomi.

Pakar – pakar ekonomi politik klasik seperti Adam Smith, David Ricardo maupun Karl Marx merupakan nama – nama legenda yang mencetuskan konsep awal mengenai ekonomi politik ini. Sedangkan ilmuwan seperti Robert Keohane, Tobert Gilpin, Peter J. Katzenstein serta Stephen Krasner merupakan nama – nama baru yang

²⁰ Investopedia. Political Economy Review. <http://www.investopedia.com/terms/p/political-economy.asp> diakses pada 20 Mei 2017.

berkembang setelahnya dalam ilmu ekonomi politik. Adam Smith pada khususnya, melalui bukunya yang berjudul *An Inquiry Into The Nature and Causes of The Wealth of Nations* menjelaskan mengenai hukum yang menuntun aktor ekonomi dan implikasi hukum ekonomi tersebut bagi masyarakat dan negara.²¹

Adam Smith secara khusus menitikberatkan pada pandangan tentang kekayaan, pembagian kerja (*division of labor*), *nature of men*, mekanisme pasar dan paham liberalisme dalam bukunya tersebut. Dalam perkembangannya, Adam Smith menekankan tentang sistem ekonomi yang bercirikan persaingan bebas dimana pasar memiliki kemampuan untuk mengelola dirinya sendiri secara independen tanpa campur tangan individu. Pasar dalam hal ini memiliki hubungan dan keterkaitan kuat dengan negara namun pasar bukanlah bagian dari suatu negara sehingga fungsi negara dalam hal ini bukan untuk memonopoli melainkan untuk memfasilitasi.

Secara harfiah, kata ekonomi politik sendiri berasal dari bahasa Yunani yakni polis yang berarti kota atau negara dan oikonomos yang berarti manajemen rumah tangga atau negara. Melalui pengertian ini dapat ditarik pengertian bahwa ekonomi politik merupakan suatu ilmu tentang bagaimana suatu negara mengatur dan menata urusan dalam negerinya dengan mempertimbangkan dua faktor utama yakni ekonomi dan politik. Dalam perkembangannya, konsep ekonomi politik memicu

²¹ Adam Smith. 1843. *An Inquiry Into The Nature and Causes of The Wealth of Nations 1st edition*. Thomas Nelson : Edinburg.

perkembangan cabang – cabang pemikiran baru seperti kapitalisme, sosialisme dan komunisme.²²

Pada dasarnya pendekatan ekonomi politik terdiri dari sejumlah disiplin ilmu yakni sosiologi, ekonomi dan ilmu sosial dimana hal ini menentukan bagaimana nantinya institusi politik, sistem ekonomi dan lingkungan politik memberikan efek dan pengaruh terhadap satu sama lain. Ekonomi sangat tergantung pada politik, begitu juga politik sangat bergantung pada ekonomi yang tengah berkembang. Dengan ini, ekonomi politik kerap kali dikaitkan erat dengan tiga sub area yakni model ekonomi dari sebuah proses politik, ekonomi politik internasional dan dampaknya pada hubungan internasional, serta peran pemerintah dalam alokasi sumber daya yang mendukung sistem ekonomi yang berlaku.

Dalam kasus penelitian thesis ini, konsep ekonomi politik sangat relevan dikarenakan faktor politik banyak menjadi tolak ukur penentu bagi *outcomes* ekonomi yang berkembang di daerah terutama Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada umumnya, kebijakan – kebijakan ekonomi yang terkait dengan peningkatan investasi asing di daerah, terbentuk karena adanya pengaruh oleh faktor politik baik politik dalam negeri maupun internasional. Dorongan – dorongan dari aktor politik berupa pemerintah pusat maupun pihak investor dalam perkembangannya menjadi pertimbangan penting pemerintah daerah untuk memutuskan pembentukan kebijakan ekonomi yang berpengaruh besar bagi pertumbuhan perekonomian di daerah. Hal ini menandakan

²² Britannica. Journal of Political Economy. <https://www.britannica.com/topic/political-economy> diakses pada 20 Mei 2017.

betapa besarnya pengaruh politik dalam menentukan capaian ekonomi yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

G. Hipotesa

Dengan mengacu pada konsep dan teori diatas, dihasilkan hipotesa sebagai berikut, faktor – faktor yang mendorong terbentuknya kebijakan – kebijakan peningkatan investasi di NTB pada tahun 2015 – 2016 , yakni:

a. Faktor internal berupa :

1. Adanya dorongan dari pemerintah pusat untuk melakukan de-regulasi terhadap aturan daerah yang menghambat investasi sebagai bagian dari upaya menjalankan dan mensukseskan paket kebijakan ekonomi nasional.
2. Terpilihnya wilayah Mandalika di NTB sebagai salah satu dari 8 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Indonesia.
3. Belum maksimalnya realisasi investasi di NTB sejak 2012 hingga 2014.

b. Faktor eksternal berupa :

1. Dilaksanakannya Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun 2015.
2. Adanya permohonan dari investor asing agar pemerintah daerah memberikan ruang dan kemudahan berinvestasi di NTB dengan menghilangkan sejumlah hambatan investasi.

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam thesis ini adalah deskriptif eksplanatif, dengan:

- a) Subjek Penelitian thesis ini adalah Pemerintah Provinsi NTB dengan fokus pada faktor – faktor yang mendorong terbentuknya kebijakan –kebijakan peningkatan investasi di NTB pada tahun 2015 – 2016.
- b) Lokasi Penelitian thesis ini yaitu Biro Hukum Kantor Gubernur Provinsi NTB dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB (DPMPTSP NTB).
- c) Jangkauan Penelitian thesis ini adalah faktor terbentuknya kebijakan peningkatan investasi asing di NTB dengan jangkauan tahun sejak 2015 hingga 2016. Kebijakan Pemerintah Provinsi NTB dipilih penulis sebagai fokus penelitian karena terbentuknya kebijakan tersebut dilihat sebagai tindakan yang cukup kontras dan frontal yang pernah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTB terlepas dari terus meningkatnya realisasi investasi di NTB setiap tahunnya. Sebelumnya, aturan – aturan mengenai investasi di NTB tergolong menyulitkan dan menghambat investasi di daerah. Upaya pemerintah dalam melakukan deregulasi ini telah berhasil meningkatkan investasi asing di NTB

secara drastis dan signifikan bahkan hingga jauh melampaui target investasi yang dicanangkan secara nasional. Sedangkan tahun 2015 – 2016 dipilih sebagai batasan penelitian karena pada tahun ini terjadi momentum dimana dibentuk sejumlah aturan – aturan baru berupa Perda – Perda sebagai upaya peningkatan investasi di NTB. Pada tahun 2015 ini, nilai investasi asing di NTB juga mencapai nilai tertinggi yang bahkan melampaui target nasional yakni mencapai Rp. 9.9 triliun. Tahun tersebut merupakan titik balik penting karena sebelum tahun 2015, pencapaian nilai investasi di NTB masih terbilang dalam angka yang cukup standar dan tidak melampaui target nasional.

- d) Sumber Data dalam thesis ini terdiri dari dua sumber, yakni sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara yang dilakukan penulis dengan Kepala Sub Bagian Rancangan Peraturan Daerah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTB dan Kepala Su Bagian Perencanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi NTB sebagai praktisi yang memiliki wawasan langsung terkait dengan kebijakan Pemerintah Provinsi NTB dalam meningkatkan investasi asing di NTB. Selain data primer dari perspektif para praktisi dan investor tersebut, penulis juga menggunakan data sekunder melalui buku, dokumen, jurnal, artikel, surat kabar dan dokumen lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara dan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Dalam metode wawancara, pengkajian data dilakukan dengan teknik merekam (recording), mengutip (noting) dan menyeleksi data (selection and changing). Metode wawancara merupakan teknik pengumpulan data primer dari pihak – pihak yang berperan sebagai informan penelitian.

Dalam melakukan wawancara, penulis menggunakan pedoman wawancara yang berisi beberapa pertanyaan pokok terkait dengan penelitian yang akan diajukan dan ditanyakan kepada informan penelitian/narasumber. Sedangkan terkait dengan teknik kedua yakni library research, metode pengumpulan data ini merupakan teknik pengumpulan data sekunder dimana data – data yang diperoleh diambil, dianalisis, dan dikutip dari berbagai sumber yakni:

1. Buku – buku ilmiah atau hasil penelitian
2. Dokumen – dokumen kebijakan
3. Jurnal, Majalah, Surat Kabar, Internet dan media lainnya yang relevan dengan objek penelitian.

3. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif dengan teknik analisis deduktif dimana digunakan beberapa teori terlebih dahulu lalu kemudian data dan fakta dikumpulkan sebagai bahan untuk menganalisis relasi dan keterkaitan antara teori dengan data dan fakta terkait secara sistematis. Melalui analisis data dan teori tersebut kemudian dapat diambil kesimpulan yang menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang diajukan.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian yang digunakan penulis dalam thesis ini akan dibagi dan dijelaskan ke dalam lima bab, yaitu:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari sejumlah sub bab yakni latar belakang masalah, tujuan riset, kontribusi riset, rumusan masalah, studi pustaka, kerangka teoritik, hipotesa, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II membahas tentang potensi daerah dan pembangunan di Provinsi NTB. Bab ini akan terdiri dari beberapa sub bab yang membahas tentang profil Provinsi NTB secara umum serta potensi daerah di NTB.

Bab III merupakan pembahasan terkait dengan dinamika kebijakan investasi di Provinsi NTB. Bab ini akan terdiri dari sejumlah sub bab seperti kebijakan – kebijakan investasi di NTB selama tahun 2012 – 2014. Sub bab selanjutnya akan membahas tentang kebijakan – kebijakan baru yang dibentuk pemerintah daerah guna meningkatkan

investasi asing dan sejumlah hambatan – hambatan investasi di NTB.

Bab IV membahas tentang faktor – faktor yang mendorong terbentuknya kebijakan – kebijakan peningkatan investasi di NTB pada tahun 2015 – 2016. Bab ini merupakan bab pembuktian hipotesa, sehingga sub bab akan terdiri dari sejumlah data yang menguatkan hipotesa dan membahas tentang faktor pendorong terbentuknya sejumlah regulasi baru yakni faktor internal dan faktor eksternal.

Bab V merupakan bab yang berisi kesimpulan dari keseluruhan kajian pada bab – bab sebelumnya. Pada bab ini akan dicantumkan juga sejumlah saran untuk memberikan masukan dan kontribusi bagi pemerintah terkait maupun pihak lainnya dalam upaya meningkatkan investasi asing di daerah.